

## Kolaborasi Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pasca Bencana di Talise Valangguni

Fitra Ramadhan Wiranata<sup>1\*</sup>; Hartawan<sup>2</sup>; Yunus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, [fitraramadani@gmail.com](mailto:fitraramadani@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia,

<sup>3</sup>Universitas Tadulako, Palu, Indonesia,

\*Correspondence : [fitraramadani@gmail.com](mailto:fitraramadani@gmail.com)

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Hunian, Bencana, Kolaborasi, Palu, Talise*

Received. : Mei 2025

Revised. : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

### ABSTRAK

Pelaksanaan hunian tetap menghadapi tantangan dalam pengelolaan lahan, koordinasi antar-stakeholder, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Maka dari itu, Penelitian ini bagaimana kolaborasi pemerintah kota dalam penyediaan hunian tetap di Talise Valangguni. Penelitian ini mengacu pada teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), mencakup dinamika, tindakan, dampak, dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, BPN, BPBD, PUPR, serta masyarakat terdampak, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penyediaan hunian tetap di Kelurahan Talise Valangguni mempercepat pengambilan keputusan dan optimalisasi sumber daya. Diskusi dan koordinasi lintas sektor mendorong keterlibatan masyarakat, memperkuat komunikasi, serta memastikan keberlanjutan program demi pemulihan pasca bencana yang lebih efektif. Keberhasilan hunian tetap pasca bencana bergantung pada koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk efektivitas dan keberlanjutan.

### ABSTRACT

*The implementation of permanent housing faces challenges in land management, stakeholder coordination, and limited community participation. Therefore, this study examines how the city government collaborates in providing permanent housing in Talise Valangguni. This research refers to the collaboration theory by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), which includes dynamics, actions, impacts, and adaptation. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observations, interviews with stakeholders such as local government, BPN, BPBD, PUPR, and affected communities, as well as policy document analysis. The findings indicate that collaboration in providing permanent housing in Talise Valangguni accelerates decision-making and resource optimization. Cross-sector discussions and coordination promote community involvement, strengthen communication, and ensure program sustainability for more effective post-disaster recovery. The success of permanent housing programs after disasters relies on coordination, transparency, and community participation to enhance effectiveness and sustainability.*

### Pendahuluan

Bencana merupakan fenomena yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan (Tanjung et al. 2020). Di Indonesia, bencana dapat

dikategorikan sebagai bencana alam, non-alam, dan sosial, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (Elyawati and Fatmawati 2021). Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di daerah rawan bencana (Bahagia et al. 2021). Ketika bencana terjadi, dampaknya dapat meluas, tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak (Yuhanafia and Andreas 2017). Salah satu peristiwa bencana besar yang terjadi di Indonesia adalah bencana alam di Kota Palu pada bulan September 2018 (Nurhadi, Akasse, and Jemy 2021). Bencana ini meliputi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan tempat tinggal bagi ribuan warga. Data mencatat bahwa total kerugian akibat bencana ini mencapai Rp 13,82 triliun, dengan sektor permukiman sebagai sektor yang mengalami dampak paling besar (Farisa 2018).

Tabel 1. Kerugian Akibat bencana

Kategori		Nilai (Rp)
Total Kerugian dan Kerusakan		13,82 triliun
Kerugian	Total Kerugian	1,99 triliun
Kerusakan	Total Kerusakan	11,83 triliun
Sektor Terdampak	Permukiman	7,95 triliun
	Infrastruktur	701,8 miliar
	Ekonomi Produktif	1,66 triliun
	Sosial	3,13 triliun
	Lintas Sektor	378 miliar
Wilayah Terdampak	Kota Palu	7,63 triliun
	Kabupaten Sigi	4,29 triliun
	Donggala	1,61 triliun
	Parigi Moutong	393 miliar

Sumber: tempo.co (2018)

Pemerintah pusat dan daerah berupaya menangani dampak bencana dengan berbagai kebijakan, salah satunya melalui program pembangunan hunian tetap (hunatap) bagi masyarakat terdampak (Saputra, Susanty, and Samadikun 2024). Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan muncul dalam penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Palu. Salah satu masalah utama adalah sengketa kepemilikan lahan di lokasi yang direncanakan sebagai hunian tetap, khususnya di Kelurahan Talise Valangguni. Masyarakat setempat mengklaim bahwa tanah yang digunakan telah mereka manfaatkan untuk bercocok tanam selama puluhan tahun, sehingga muncul konflik antara pemerintah dan warga terkait hak guna lahan. Selain itu, proses relokasi juga menghadapi hambatan dalam hal administrasi, kesiapan infrastruktur, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan

bangunan yang telah ditetapkan.

Selain konflik kepemilikan lahan, tantangan lain yang dihadapi dalam penyediaan hunian tetap adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam pembangunan hunian yang layak bagi warga terdampak (Babamaaji et al. 2024). Meskipun telah ada keputusan dari Gubernur Sulawesi Tengah dan instruksi dari Presiden Republik Indonesia mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, implementasi program ini masih terkendala dalam hal pendanaan serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan eksekusi. Kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan kurangnya transparansi dalam alokasi dana juga menjadi faktor yang memperlambat proses pembangunan. Dampak dari ketidaksempurnaan implementasi program hunian tetap ini tidak hanya dirasakan dari sisi infrastruktur, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (Erna, Lionardo, and Wulandari 2024). Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan baru, terutama jika lokasi relokasi jauh dari sumber ekonomi mereka sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga terdampak dan berpotensi memperburuk kondisi sosial pasca bencana. Oleh karena itu, strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program hunian tetap dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat terdampak.

Penelitian mengenai penanganan pasca bencana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Abdillah (2024) menekankan bahwa kolaborasi antar-stakeholder menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan publik, termasuk dalam penyediaan hunian bagi korban bencana. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat membantu mempercepat proses relokasi serta meningkatkan kualitas hunian yang dibangun. Namun, dalam praktiknya, koordinasi yang tidak optimal dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Sementara itu, penelitian oleh Rakhmawan, Sutaryono, and Setiowati (2019) mengungkapkan bahwa pengadaan tanah berbasis kebencanaan di Kota Palu menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aspek legalitas, kepemilikan lahan, dan resistensi masyarakat lokal. Faktor ini menjadi hambatan utama dalam percepatan program relokasi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan tanah. Dalam relokasi pasca bencana di Kota Palu, Bahri (2024) menjelaskan bahwa transmisi informasi kebencanaan dalam implementasi kebijakan relokasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai urgensi dan manfaat dari program relokasi tersebut. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempersulit proses negosiasi lahan. Selain itu, penelitian oleh Khansa and Hartono (2021) menunjukkan bahwa dalam menentukan kelayakan hunian bagi penyintas bencana, perlu mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan, seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan kondisi bangunan yang memenuhi standar keamanan.

Penyediaan hunian yang tidak layak dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kolaborasi pemerintah kota dalam penyediaan hunian tetap pasca bencana alam di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu. Penyediaan hunian tetap tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah daerah, melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah (BPPW Sulteng), berperan penting dalam memastikan program ini berjalan dengan efektif. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan, termasuk konflik kepemilikan lahan, yang mempengaruhi progres pembangunan dan serah terima hunian kepada warga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proses kolaborasi oleh Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), yang mencakup tiga aspek utama yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi dalam proses tersebut. Dengan memahami ketiga aspek ini, penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan relokasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena kolaborasi pemerintah dalam penyediaan hunian tetap pasca bencana di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali kompleksitas pengalaman, persepsi, dan kendala yang dialami oleh berbagai pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan pemahaman holistik mengenai dinamika yang terjadi (Sugiyono 2017). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap berbagai interaksi, proses, dan faktor yang memengaruhi implementasi program hunian tetap. Pendekatan deskriptif melengkapi metode kualitatif dengan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa dan proses yang diteliti (Abdussamad 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun narasi yang jelas tentang konteks dan realitas yang dihadapi dalam pelaksanaan program, sehingga temuan penelitian dapat dihubungkan secara langsung dengan kondisi di lapangan. Dengan kombinasi metode ini, penelitian tidak hanya mampu menangkap data yang mendalam tetapi juga menyajikan deskripsi yang terstruktur mengenai fenomena yang diteliti, memberikan wawasan yang komprehensif dan bernilai praktis (Nasution 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Lima informan yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program hunian tetap, yakni Kepala Satuan Kerja BPPW Sulteng, Korsub Pengadaan Tanah ATR/BPN, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu, serta Lurah Talise Valangguni. Teknik purposive

sampling digunakan karena para informan memiliki informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, observasi langsung di lokasi hunian tetap dilakukan untuk memahami kondisi lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari arsip, laporan pemerintah, dan kebijakan terkait.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Selain itu, instrumen tambahan seperti pedoman wawancara dan lembar observasi digunakan untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Humberman, and Saldana (2014), yang terdiri dari empat tahap utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terus mengevaluasi dan memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh hingga mencapai tingkat kejenuhan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi pemerintah dalam penyediaan hunian tetap serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya (Ahyar et al. 2020).

## Hasil

Penelitian ini mengungkap bahwa penyediaan hunian tetap bagi penyintas bencana di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu, menghadapi berbagai kendala yang kompleks, terutama dalam aspek legalitas lahan, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Sengketa kepemilikan lahan menjadi permasalahan utama yang menghambat percepatan pembangunan. Masyarakat yang telah lama bermukim dan memanfaatkan lahan tersebut merasa memiliki hak atas tanah, sementara pemerintah berupaya menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi hunian tetap bagi para penyintas. Ketidakjelasan status hukum ini memicu ketegangan dan memperlambat proses relokasi, mengakibatkan banyak penyintas masih bertahan di tempat tinggal sementara dengan kondisi yang kurang layak. Selain sengketa lahan, minimnya infrastruktur dasar seperti akses jalan, pasokan air bersih, dan layanan kesehatan juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi program hunian tetap.

Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kawasan hunian tetap yang telah memiliki akses listrik dan air bersih yang memadai. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat hunian karena masyarakat enggan berpindah ke lokasi yang belum mendukung kebutuhan dasar mereka. Grafik hasil survei terhadap calon penghuni menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden merasa infrastruktur di hunian tetap belum layak untuk ditempati. Temuan ini memperjelas bahwa pembangunan hunian harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas penunjang agar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penyintas. Dari segi kebijakan dan koordinasi, penelitian

ini menemukan bahwa tumpang tindih kewenangan antar instansi sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah, kementerian terkait, dan organisasi kemanusiaan memiliki peran yang tumpang tindih dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga koordinasi yang tidak optimal berakibat pada ketidakefektifan implementasi di lapangan. Keputusan yang tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan ketidakpastian dalam eksekusi program, termasuk dalam hal pendanaan dan perizinan lahan. Oleh karena itu, strategi kolaboratif yang lebih inklusif dan sistematis diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan penyediaan hunian tetap bagi penyintas bencana dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas hidup para penyintas secara berkelanjutan.

### 1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dalam penyediaan Hunian Tetap (Hunatap) di Kelurahan Talise memperlihatkan keterlibatan sejumlah instansi kunci, yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah kelurahan. Kolaborasi lintas sektor ini menekankan pentingnya prinsip bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas tindakan dalam mendukung proses rehabilitasi pasca bencana. Informasi primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Satuan Kerja BPPW Sulteng, Korus Pengadaan Tanah ATR/BPN, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu, serta Lurah Talise Valanguni. Teknik purposive sampling digunakan karena para informan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program Hunatap.

Prinsip bersama dalam kolaborasi antarinstitusi ditunjukkan melalui forum koordinasi rutin yang memfasilitasi proses diskusi, identifikasi masalah, hingga pengambilan keputusan secara kolektif. Kepala Satuan Kerja BPPW Sulteng menyampaikan bahwa,

“Semua proses pembangunan Hunatap kami lakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Tidak bisa satu pihak saja yang bekerja, karena pembangunan hunian tetap menyangkut banyak aspek—dari lahan hingga sosial masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Hunatap bertumpu pada sinergi antarsektor yang aktif dan terbuka.

Dalam konteks ini, koordinasi menjadi instrumen penting dalam menyatukan persepsi lintas kelembagaan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu, yang menyatakan,

“Kami rutin melakukan rapat mingguan maupun bulanan untuk membahas progres dan kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan cara ini, langkah-langkah taktis dapat segera diambil bersama.”

Motivasi bersama juga menjadi faktor yang memperkuat kolaborasi. Seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyukseskan program Huntap, yang terlihat dari partisipasi aktif dalam penyusunan strategi dan pengambilan kebijakan. Menurut Korsub Pengadaan Tanah ATR/BPN,

“Kami sangat memahami urgensinya. Masyarakat terdampak bencana sangat membutuhkan hunian yang layak, sehingga koordinasi dan percepatan proses pengadaan tanah menjadi prioritas utama kami.” Komitmen tersebut tidak hanya terlihat dalam ranah teknis, tetapi juga dalam penyediaan pendampingan sosial dan administratif kepada masyarakat penerima manfaat.

Kepala Kelurahan Talise Valangguni juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan program. Ia menyampaikan,

“Pihak kelurahan lebih fokus pada pendekatan sosial ke warga. Banyak warga yang awalnya ragu, tetapi dengan penjelasan yang terbuka dan pendampingan yang konsisten, mereka akhirnya bersedia untuk direlokasi.”

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya berasal dari lembaga formal, tetapi juga dari pemahaman atas kondisi sosial masyarakat yang terdampak. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga menjadi aspek krusial dalam dinamika kolaborasi ini. Meskipun belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun secara kolektif, seluruh instansi menjalankan perannya berdasarkan regulasi sektoral masing-masing. Kepala Satuan Kerja BPPW Sulteng menjelaskan bahwa, “Kami memang belum memiliki SOP yang dirumuskan lintas instansi secara khusus untuk Huntap, tetapi masing-masing bekerja dengan pedoman teknis yang sudah ada. Yang penting adalah koordinasinya berjalan.” Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam mengatasi keterbatasan prosedural.

Observasi langsung di lapangan mengindikasikan bahwa tidak adanya SOP formal tidak menghambat proses kolaborasi, selama komunikasi antarinstansi tetap terbuka dan responsif terhadap perubahan dinamika. Strategi yang adaptif terhadap kondisi di lapangan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan percepatan pembangunan Huntap, terutama dalam mengatasi kendala seperti klaim lahan dan resistensi masyarakat terhadap relokasi. Dengan demikian, dinamika kolaborasi dalam program Huntap di Kelurahan Talise menunjukkan bahwa prinsip kebersamaan, komitmen antarlembaga, serta kapasitas untuk bertindak secara kolektif menjadi elemen fundamental yang menentukan keberhasilan program. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan hunian tetap, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejalan dengan itu, penguatan koordinasi serta penyusunan SOP bersama menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu.

## 2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan dalam kolaborasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian tetap (huntap) di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu. Berbagai bentuk tindakan yang dilakukan, baik dalam bentuk pelaksanaan program, diskusi, maupun koordinasi antarinstansi, mencerminkan dinamika kolaborasi yang berkembang dalam upaya memastikan keberhasilan program ini. Kualitas tindakan yang diambil sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kolaborasi, serta kemampuan setiap aktor yang terlibat dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang konstruktif. Dalam proses memajukan kolaborasi, berbagai instansi yang terlibat dalam penyediaan huntap berupaya menjaga kesinambungan kerja sama dengan melakukan pertemuan dan diskusi secara rutin. Kepala Satuan Kerja BPPW Sulawesi Tengah menegaskan bahwa forum-forum diskusi menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan setiap proyek yang dijalankan. Melalui diskusi ini, para pemangku kepentingan dapat bertukar pandangan, menyamakan persepsi, serta mencari solusi terhadap tantangan yang muncul dalam proses penyediaan huntap. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang intens dan koordinasi yang solid antar pihak.

Selain itu, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses kolaborasi juga sangat signifikan, terutama dalam memastikan bahwa lokasi yang dipilih untuk pembangunan huntap aman dan layak huni. Sebagaimana dijelaskan oleh perwakilan dari BPN, koordinasi yang erat dengan instansi lain menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa aspek legalitas dan keamanan lahan telah dipertimbangkan dengan matang sebelum pembangunan dilakukan. Tindakan ini tidak hanya menghindari potensi konflik lahan di kemudian hari, tetapi juga menjamin bahwa huntap yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya, keterbukaan dan kerja sama yang baik antara berbagai instansi pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam memperlancar proses kolaborasi. Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD menekankan pentingnya sikap saling terbuka dan berkomunikasi secara efektif dalam menjalankan program penyediaan huntap. Sikap ini memungkinkan setiap pihak untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga potensi kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalisir.

Di tingkat masyarakat, peran pemerintah kelurahan dalam mendukung proses kolaborasi juga terlihat melalui keterlibatan mereka dalam memberikan edukasi kepada warga terkait regulasi lahan dan prosedur pembangunan huntap. Lurah Talise Valangguni menjelaskan bahwa pihak kelurahan sering melakukan pertemuan dengan warga untuk menyelesaikan berbagai klaim lahan yang muncul, sekaligus memberikan pemahaman mengenai kebijakan yang sedang dijalankan. Dengan adanya peran sebagai mediator, kelurahan dapat membantu menciptakan kesepahaman antara masyarakat dan instansi pemerintah, sehingga proses penyediaan huntap dapat

berjalan lebih lancar dan minim konflik.

Dapat dilihat bahwa upaya memajukan proses kolaborasi dalam penyediaan huntap di Kelurahan Talise Valangguni dilakukan melalui koordinasi yang intensif, komunikasi yang terbuka, serta kerja sama lintas sektor. Dengan adanya pertemuan rutin dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak, program ini dapat berjalan secara lebih sinergis dan terarah. Selain itu, peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memastikan kelayakan lokasi huntap menjadi elemen kunci dalam keberhasilan program ini. Keseluruhan proses kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga pada kualitas koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang terdampak bencana.

### 3. Dampak dan Adaptasi

Tindakan dalam kolaborasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama antarinstansi dalam penyediaan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu. Pelaksanaan program, forum diskusi, serta koordinasi lintas sektor menjadi indikator utama dalam membaca dinamika kolaborasi yang berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh setiap aktor dalam kolaborasi ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peran masing-masing serta komitmen dalam menjaga komunikasi yang konstruktif dan berkesinambungan. Kepala Satuan Kerja BPPW Sulawesi Tengah menegaskan bahwa salah satu bentuk tindakan yang paling krusial dalam kolaborasi adalah penyelenggaraan forum diskusi dan pertemuan rutin. Ia menyatakan,

“Diskusi menjadi ruang utama bagi kami untuk menyamakan persepsi, mengklarifikasi isu di lapangan, dan menyusun langkah tindak lanjut secara bersama. Ini penting agar setiap pihak tahu apa yang menjadi peran dan batasannya.” Forum semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis dalam rangka percepatan pembangunan Huntap.

Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam konteks kolaborasi sangat krusial dalam memastikan bahwa aspek legalitas dan kesiapan lahan telah terpenuhi sebelum dilakukan pembangunan. Hal ini dikonfirmasi oleh perwakilan Korsub Pengadaan Tanah ATR/BPN yang menyampaikan,

“Koordinasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih klaim kepemilikan dan memastikan lahan yang digunakan tidak bermasalah secara hukum. Kami juga memastikan lokasi tersebut aman secara teknis dan sesuai peruntukannya.” Tindakan preventif ini merupakan bagian dari mitigasi konflik di masa depan dan upaya memastikan keberlanjutan manfaat dari program Huntap bagi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menuturkan,

“Jika komunikasi tidak dibangun dengan baik, maka akan sulit memetakan kendala dan mencari solusinya. Maka dari itu, kami selalu mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan koordinasi aktif, khususnya dalam proses penyesuaian teknis dan administratif di lapangan.”

Tindakan ini mencerminkan pendekatan koordinatif yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif, memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika lapangan. Di tingkat lokal, keterlibatan pemerintah kelurahan juga memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas tindakan kolaboratif. Lurah Talise Valangguni mengungkapkan bahwa kelurahan sering kali menjadi jembatan antara instansi teknis dan masyarakat. Ia mengatakan,

“Kami berperan aktif dalam menyosialisasikan program ke masyarakat, terutama terkait status lahan dan prosedur pembangunan Huntap. Jika ada klaim tumpang tindih atau ketidaksepahaman warga, kami yang turun langsung untuk memediasi.”

Tindakan ini tidak hanya mendukung kelancaran teknis pembangunan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sedang berlangsung. Observasi langsung di lokasi Huntap menunjukkan bahwa tindakan koordinatif dan komunikasi yang terbuka menjadi strategi utama dalam meminimalkan hambatan yang mungkin muncul. Berbagai tantangan seperti resistensi warga terhadap relokasi, klaim kepemilikan lahan, hingga keterbatasan informasi teknis dapat diatasi melalui pendekatan kolaboratif yang bersifat solutif dan responsif. Dengan demikian, tindakan dalam kolaborasi penyediaan Huntap di Kelurahan Talise Valangguni tidak hanya terwujud dalam aspek teknis pembangunan, tetapi juga dalam praktik komunikasi, mediasi sosial, dan penguatan kelembagaan. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kualitas interaksi antaraktornya. Melalui koordinasi yang intensif, komunikasi yang terbuka, serta tindakan yang berbasis peran dan kapasitas masing-masing instansi, program ini dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam penyediaan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta tantangan administratif dan sosial. Proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat,

mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun adanya upaya untuk membangun kerja sama yang solid, masih terdapat kendala yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat terdampak.

Tindakan kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penyediaan Huntap menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini. Koordinasi yang dilakukan antarinstansi telah membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Melalui diskusi, pertemuan rutin, dan kerja sama lintas sektor, berbagai pihak berupaya untuk menyelaraskan tujuan dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan hunian tetap. Namun, tantangan seperti klaim tanah, perbedaan kepentingan antarinstansi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program ini menjadi hambatan yang mengharuskan adanya strategi adaptasi yang lebih baik.

Dampak dari proses kolaborasi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk membangun kerja sama yang kuat, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Penyelesaian klaim tanah yang masih berlangsung menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan pendekatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar proses ini dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti bahwa adaptasi dalam proses kolaborasi sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lapangan. Upaya seperti peningkatan komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta fleksibilitas dalam kebijakan menjadi bagian dari strategi adaptasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan tantangan yang ada.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program penyediaan hunian tetap. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan administratif dan sosial yang dihadapi dalam proses ini masih menjadi kendala yang signifikan, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek teknis pembangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada koordinasi antarinstansi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap prosesnya.

Temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap praktik dan kebijakan pemerintah dalam penyediaan hunian tetap. Pemerintah perlu mengadopsi strategi yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan aspek sosial dan administratif secara lebih mendalam. Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika di lapangan perlu dikembangkan agar setiap tantangan yang muncul dapat segera diatasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan baru dalam pengelolaan program hunian tetap serta menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kolaboratif dan adaptif dalam proses

implementasinya.

### **Kesimpulan**

Dari berbagai aspek yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam penyediaan hunian tetap (Hunatap) di Kelurahan Talise Valangguni, dinamika kolaborasi muncul sebagai elemen kunci dalam menentukan efektivitas pelaksanaannya. Meskipun kolaborasi telah mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengoptimalkan sumber daya, tantangan administratif, koordinasi antarinstansi, serta perbedaan kepentingan masih menjadi kendala dalam implementasi program. Tindakan kolaboratif yang dilakukan melalui pertemuan, diskusi, serta koordinasi lintas sektor telah membantu mengatasi beberapa hambatan, namun masih diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan klaim tanah dan keterlibatan masyarakat. Dampak dari proses kolaborasi menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan Hunatap, tetapi adaptasi terhadap tantangan yang muncul masih menjadi kebutuhan mendesak. Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur serta sosialisasi yang belum optimal menghambat pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan, sehingga memicu resistensi dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini membutuhkan strategi adaptasi yang lebih fleksibel, dialog terbuka antara pemangku kepentingan, serta pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

### **Saran**

Untuk mengatasi kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan sosialisasi yang belum optimal dalam pembangunan hunian tetap (Hunatap) di Kelurahan Talise, disarankan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi melalui forum komunikasi yang rutin dan terencana, serta meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih inklusif. Sosialisasi ini harus menggunakan media yang mudah dipahami dan melibatkan semua elemen masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Selain itu, perlu ada peningkatan dialog terbuka antara pemangku kepentingan dan masyarakat, serta kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Pendekatan ini harus didukung dengan pelatihan kapasitas bagi aparat pemerintah agar komunikasi dan mediasi dapat berjalan efektif. Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program ini, serta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih saya sampaikan kepada Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan akademik dalam penyelesaian penelitian ini. Saya juga

mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta pihak kelurahan yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, saya berterima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral serta doa, serta teman-teman yang turut membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

## Referensi

- Abdillah, Fajrin Rizki. 2024. “Urgensi Kolaborasi Stakeholder Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik The Urgency of Stakeholder Collaboration in Increasing The Quality Of Public Services.” *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 5(1):98–109.
- Abdussamad, H. Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. Makassar: syakir Media Press.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M. Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, M. Si. Helmina Andriani, Rhousandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu.
- Babamaaji, Rakiya A., Matthew O. Adepoju, Jagila Jantiku, Damashi Mantim Tali, Shagari S. Musa, Ihiabe Abdulmumin, Timothy Samuel Tiworoyang, Sani A. Tswako, and Echukwu Ezinne Valentina. 2024. “Farmland Inventory Delineation and Vegetation Cover Change Using Space-Based Technology in Federal Capital Territory (Fct), Nigeria.” *American Journal of Food Science and Technology* 12(5):139–49. doi: 10.12691/ajfst-12-5-1.
- Bahagia, Bahagia, F. Mangunjaya, Rimun Wibowo, Zulkifli Rangkuti, and Zakky Muhammad Noor. 2021. “Social and Religion Value of Muludan and Mutual Assisting in Community.” doi: 10.31004/EDUKATIF.V3I6.997.
- Bahri, Syamsul. 2024. “Transmisi Informasi Kebencanaan Dalam Penerapan Kebijakan Relokasi Pasca Gempa Bumi , Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Sulawesi Tengah.” *Journal Of Government Science (GovSci)* 5(2):79–99.
- Elyawati, Elyawati, and Noor Fatmawati. 2021. “Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Bencana Alam (Studi Kasus Di Rintisan Desa Wisata Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).” doi: 10.21043/JI.V5I1.8905.
- Emerson, K., T. Nabatchi, and S. Balogh. 2012. “An Integrative Framework for Collaborative Governance.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1):1–29. doi: 10.1093/jopart/mur011.
- Erna, Yus, Andries Lionardo, and Novita Wulandari. 2024. “Efektivitas Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali.” *Journal of Law & Policy Review* 2(1):139–46.

- Farisa, Fitria Chusna. 2018. "Begini Kronologi Gempa Dan Tsunami Palu-Donggala Yang Tewaskan Ratusan Orang." *Kompas.Com* 1. Retrieved March 17, 2025 (<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/29/16415971/begini-kronologi-gempa-dan-tsunami-palu-donggala-yang-tewaskan-ratusan-orang>).
- Khansa, Sulthana Labiba, and Budi Hartono. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelayakan GOR Otista Jakarta Timur Menjadi Hunian Sementara Korban Bencana Banjir Ditinjau Dari Aspek Kesehatan Lingkungan Tahun 2019." *Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global* 2(2):62–72. doi: 10.7454/jnklg.v2i2.1000.
- Miles, Matthew B., A. Michael Humberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. edited by H. M. Albina. Bandung: Harfa Creative.
- Nurhadi, Nurhadi, Hengky Akasse, and Ulfa Jemy. 2021. "Analisis Dampak Ekonomi Akibat Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi Di Kota Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4(11):578–85. doi: 10.56338/jks.v4i11.1983.
- Prasongko, Diaz. 2018. "BNPB: Kerugian Akibat Bencana Di Sulawesi Tengah Rp 13,82 T." *Tempo.Co* 1. Retrieved February 12, 2025 (<https://www.tempo.co/ekonomi/bnpb-kerugian-akibat-bencana-di-sulawesi-tengah-rp-13-82-t--805241>).
- Rakhmawan, Mokhammad Usman, Sutaryono Sutaryono, and Setiowati. 2019. "Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan Di Kota Palu." *Tunas Agraria* 2(3):106–23. doi: 10.31292/jta.v2i3.41.
- Saputra, Mohamad Handri, Aries Susanty, and Budi Prasetyo Samadikun. 2024. "Manajemen Sumber Daya Dalam Percepatan Pembangunan Hunian Tetap ( Huntap ) Pascabencana Longsor Dan Banjir Di Pulau Serasan ( Pulau Terluar Indonesia )." *Jurnal Profesi Insiyur Indonesia* 2(1):54–58.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Tanjung, Rahman, Dedi Mulyadi, Opan Arifudin, and Fenny Damayanti Rusmana. 2020. *Manajemen Mitigasi Bencana*. Vol. 53. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Yuhanafia, Nurul, and Heri Andreas. 2017. "PERTAMBAHAN ESTIMASI KERUGIAN EKONOMI AKIBAT BANJIR DENGAN PENGARUH PENURUNAN TANAH DI JAKARTA." doi: 10.17509/GEA.V17I2.7490.